



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
*FOCUS GROUP DISCUSSION*  
PENGEMBANGAN EKSPOR SEKTOR JASA DIGITAL  
“NGABUBURIT NGOBROLIN JUALAN  
DIGITAL KE LUAR NEGERI”  
Sewon Bantul, 16 Mei 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua

- Yang saya hormati, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Nasional;
- Yang saya hormati, Direktur Privy ID
- Yang saya hormati Ketua Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (Aditif)
- Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati

Selamat datang di Yogyakarta!

Saul Berman, Chief Strategist IBM, menyatakan bahwa, “Kita telah beralih dari era produk dan infrastruktur digital ke era distribusi digital. Strategi web mulai bertransformasi ke arah yang lebih holistik melalui platform seluler, media sosial, digitalisasi dan kekuatan analitik. Kami pikir ini benar-benar era baru yang membutuhkan strategi baru”

Hadirin dan Saudara-Saudara Sekalian,

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi nyata-nyata dapat mempengaruhi kinerja dan tingkat ekonomi individu, kelompok masyarakat dan bahkan suatu negara. Teknologi informasi saat ini juga telah mendukung aktifitas-aktifitas kehidupan yang semakin kompleks. Hampir dikatakan, tidak ada bidang pekerjaan di masa kini yang tidak terkena sentuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Merujuk pada Ramey (2012), TIK berperan dalam beberapa aspek, yaitu aktifitas organisasional, terutama pada aspek komunikasi, manajemen data, dan sistem informasi manajemen. Di dunia perbankan, TIK mendukung proses-proses layanan dan infrastruktur, yaitu remote banking, pemusatan informasi finansial, kartu kredit/kartu pintar. Pendidikan saat ini juga tak terlepas dari sentuhan TIK, terutama dalam mendesain kemudahan akses ke informasi pendidikan dan konsep belajar dari mana saja (online learning). Masih banyak lagi area kehidupan manusia yang sudah tersentuh oleh TIK, seperti kemasyarakatan, pertanian dan hiburan. Dan kadang tanpa disadari, dibalik tingginya penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari, tersembat sebuah peluang yang sedemikian besar, yaitu sektor bisnis, terutama sektor jasa digital.

Pada hari ini, kita berkumpul disini untuk membahas sebuah peluang, menginisiasi sebuah harapan dan berkolaborasi untuk sebuah pemikiran dalam menjajagi peningkatan ekspor sektor jasa digital di Indonesia. Pertemuan hari ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pertemuan di Tangerang pada tanggal 23 April 2019. Pertemuan ini menjadi penting, mengingat pertumbuhan bisnis start up di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Merujuk pada Startup Ranking per 21 Maret 2019, Indonesia memiliki 2.074 startup dan menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia.

Saudara-saudara sekalian,

Tak hanya mashur di negeri sendiri, startup Indonesia diharapkan bertaji dan mampu berkompetisi di kancah internasional dengan cara mengekspor jasa digital. Untuk mencapai sukses diperlukan prinsip-prinsip kerja seperti realistis, bertanggungjawab, cerdas mengelola resiko, ketepatan bidang bisnis dengan passion dan kompetensi. Pemerintah bersama masyarakat harus berkolaborasi dalam penguatan ekspor jasa digital. Networking dan komunikasi harus senantiasa dikembangkan. Komunikasi bisnis di tingkat nasional harus diperkuat dan ditujukan untuk penguatan startup lokal.

Era industri 4.0 telah menjadi gerbang kesejahteraan bagi siapapun yang mau belajar, berkreasi dan berinovasi. Saya yakin bisnis kreatif akan menjadi pilar ekonomi di Indonesia pada masa mendatang. Generasi muda mempunyai potensi yang besar untuk masuk ke industri ini, baik di bidang film, di bidang video, di bidang seni pertunjukan, bidang seni tradisi, bidang games, maupun animasi. Kreatifitas generasi muda diharapkan mampu menciptakan unicorn-unicorn baru yang akan mengekspansi pasar internasional dan menjadikan bangsa ini bersaing dengan negara lain. Sekali lagi, kata kuncinya adalah kreativitas, inovasi, keterbukaan dan kesiapan menerima perubahan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung tumbuhnya startup dan pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya co-working space inklusif dan ramah difabel di area Dinas Kominfo DIY, di Jalan Brigjend Katamso. Diresmikan tahun 2018, Co-Working Space (CWS) ini telah menjadi tempat berkumpulnya insan dan komunitas kreatif yang dapat mendukung industry digital. CWS ramah difabel ini dilengkapi dengan ruang multimedia dan internet berkecepatan tinggi, up to 90 megabyte per second. CWS dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai untuk menunjang kegiatan berkarya. Fasilitas tersebut di antaranya ada

ruang multimedia, terdiri dari ruang komputer dan ruang studio, *outdoor space*, ruang kelas dan ruang diskusi.

Hadirin dan Saudara-Saudara Sekalian,

Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi dan saling berbagi. Semoga keindahan panorama dan ramah budaya Yogyakarta bisa memberikan inspirasi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Sewon Bantul, 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
PELATIHAN CHAIN of CUSTODY  
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (CoC – FSC)  
BAGI PELAKU INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU  
Yogyakarta, 03 Mei 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Direktur Program Kalimantan Forest and Freshwater; Bapak Irwan Gunawan,
- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Para Peserta Pelatihan, Hadirin, serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa mengucapkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pelatihan Chain of Custody Forest Stewardship Council (CoC – FSC) bagi pelaku industri pengolahan kayu.

Hadirin sekalian,

Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Hal tersebut antara lain disebabkan terbatasnya lahan pertanian. Industrialisasi merupakan suatu jawaban terhindarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Sehingga yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak atau mencemari lingkungan.

Apabila hal itu tidak mendapat perhatian yang serius, maka ada kesan bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring. Dalam arti, semakin maju industri akan semakin rusak lingkungan hidup itu. Hal itu karena kegiatan industri memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, industri berbasis kayu dan hasil hutan dalam melaksanakan produksinya misalnya, kini tidak lagi bebas menggunakan bahan baku. Sebagai pengolah kayu dan hasil hutan, para pengusaha industri disektor ini harus mencermati dan memahami perubahan yang terjadi terkait dengan regulasi di bidang bahan baku dan hasil hutan. Peraturan tentang persyaratan pengadaan dan perdagangan kayu dan hasil hutan, tentu secara langsung maupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi industri berbasis kayu dan hasil hutan. Hal itu mengingat hutan sebagai karunia Tuhan YME yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, kini kondisinya cenderung semakin menurun. Padahal hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah, sebagai urat nadi kehidupan manusia.

Dalam konteks itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya, salah satunya adalah dengan mengembangkan skema sertifikasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang legal, lestari dan bertanggung jawab.

Hadirin yang saya hormati,

Di Indonesia terdapat beberapa skema sertifikasi, salah satunya adalah Forest Stewardship Council (FSC). Skema sertifikasi FSC ini mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab melalui pengukuran berkelanjutan 3 pilar utama, yaitu berkelanjutan lingkungan, manfaat sosial yang berkelanjutan, dan ekonomi yang produktif.

Sistem lacak balak atau Chain of Custody (CoC) merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan bertanggung jawab. Lacak balak digunakan untuk memastikan bahan baku produk berasal dari sumber/hutan yang bersertifikat dan proses produksi di sepanjang rantai supply tidak tercampur bahan baku lain yang tidak bersertifikat. Pada skema FSC, sertifikat lacak balak dikenal dengan CoC- FSC yang dapat diterapkan pada produsen, manufaktur, dan pedagang hasil hutan.

Dalam kaitan itu, saya sangat mengapresiasi Pelatihan Chain of Custody Forest Stewardship Council (CoC – FSC) bagi pelaku industri pengolahan kayu yang diselenggarakan ini. Karena bertujuan untuk mengenalkan standart FSC industri pengolahan kayu yang belum menerapkan skema Coc-FSC. Meningkatkan pemahaman, kemampuan dan pembaharuan informasi sistem lacak balak (CoC) bagi staf yang terlibat langsung dengan proses produksi dan/atau sertifikasi pada industri pengolahan kayu yang sudah menerapkan skema Coc-FSC, serta penerapan sistem lacak balak secara tepat di industri pengolahan kayu.

Oleh karenanya saya berharap, para peserta pelatihan CoC-FSC yang nota bene para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu, mampu untuk lebih memahami standart FSC CoC dan dapat menerapkan sistem lacak balak secara tepat.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti pelatihan yang sangat penting ini, semoga pelatihatam berjalan lancar dan banyak memberikan manfaat bagi para peserta, serta banyak hal yang dapat kita pelajari bersama.

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan  
PEMBUKAAN  
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN  
XI PEMDA DIY TAHUN 2019**

**Gunung Sempu, 27 Mei 2019**

-----  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang Kami hormati,**

- Para Widyaiswara dan Para Instruktur;
- Saudara-saudara Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI Pemda DIY Tahun 2019;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul ditempat ini guna mengikuti Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI Pemda DIY Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

**Hadirin dan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III  
sekalian yang berbahagia,**

Kondisi birokrasi saat ini masih memperlihatkan *mindset* aparatur yang perlu dirubah, tidak hanya struktur dan fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Perubahan perilaku aparatur memberikan kesadaran baru bahwa pemerintah dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat. Masyarakat masih melihat ada kesenjangan antara kinerja ASN yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dihasilkan.

Fenomena kesenjangan ini menjadi bukti bahwa aparatur pemerintah masih memiliki kompetensi yang kurang optimal yang mengakibatkan rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di instansi pemerintah.

Berkaitan dengan itu, aparatur sekarang sudah harus netral dan profesional dalam mengembangkan diri, merubah karakter dan sikap perilaku, kemampuan menjunjung tinggi etika publik dan taat pada nilai-nilai, norma-norma, moralitas serta bertanggung jawab agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasinya.

Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara sekalian untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI Pemda DIY Tahun 2019 ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan sumber daya aparatur. Pelatihan Dasar ini merupakan perwujudan upaya kita bersama dalam rangka mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur.

### **Hadirin sekalian,**

Pelaksanaan tugas baik pada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila ASN memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut diindikasikan oleh kemampuan dalam menguasai secara teknis bidang tugasnya, kemampuan dalam menempatkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya dan

kemampuan yang menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Hal ini karena tantangan dalam membenahi birokrasi atau sektor publik sangat besar dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama di dunia birokrasi, untuk itu diperlukan agen perubahan yang mempunyai kemampuan kepemimpinan adaptif dan daya inovasi yang tinggi.

Untuk itu melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan III yang diikuti ini, diharapkan dapat membentuk Bapak/Ibu/Saudara menjadi agen perubahan yang mampu memperbaiki kualitas sektor publik, dan dengan kapasitas yang dimiliki diharapkan dapat mampu melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kinerja di instansi masing-masing.

Wujudkanlah kemampuan profesional dan didukung dengan mental yang baik, kemauan, rasa tanggung jawab dalam menciptakan situasi kerja yang baik dan harmonis baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja, karena hal tersebut akan mencapai kinerja yang optimal dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, **Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI Pemda DIY Tahun 2019**, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Gunung Sempu, 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Ir. GATOT SAPTADI**



**Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan  
PEMBUKAAN  
RAPAT KERJA REFORMASI BIROKRASI 2019**

**Yogyakarta, 24 Mei 2019**

-----  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang Kami hormati,**

- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Kerja Reformasi Birokrasi 2019;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara Rapat Kerja Reformasi Birokrasi 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

**Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,**

Kebijakan otonomi daerah telah merubah penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terdesentralisasi dengan membawa implikasi beralihnya sebagian besar urusan pemerintah pusat kepada daerah. Konsekuensinya adalah ada keharusan untuk melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan

perangkat daerah, termasuk didalamnya aparaturnya penyelenggara pemerintahan daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hal utama yang kita perhatikan adalah apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dari pemerintah daerah dan apa yang pemerintah daerah dapat agendakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa merefleksikan interaksi yang sinergis antara pejabat publik dan aparaturnya birokrasi pemerintah daerah dengan masyarakatnya, melalui ruang partisipasi yang proporsional sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Dengan demikian perlu untuk mengupayakan penyelarasan peran dan penyesuaian posisi birokrasi pemerintahan daerah, termasuk didalamnya pembenahan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparaturnya dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam mewujudkan upaya tersebut maka kita semua harus memahami dan menghayati benar-benar paradigma baru melalui reformasi birokrasi tentang penyelenggaraan pelayanan oleh aparaturnya pemerintahan yang dibutuhkan pada saat ini, yaitu “satu paradigma yang menempatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat di atas segala-galanya, atau dalam artian lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai pelayan atau abdi masyarakat yang baik”.

**Hadirin sekalian,**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi merupakan prioritas nasional tata kelola pemerintahan

guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai semua itu, sebagai seorang aparatur pemerintahan, kita harus memiliki tekad yang kuat dan bulat, didasari oleh rasa tanggung jawab baik terhadap pemerintah maupun bagi masyarakat dan lebih luas lagi terhadap bangsa dan negara dalam mengabdikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintah daerah, maka posisi kita merupakan unsur pelaksana pembangunan dengan mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat sekaligus pemersatu bangsa, yang senantiasa dituntut dapat berperan lebih dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Hal ini sesuai dengan agenda pembangunan bangsa yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, bersih, amanah, transparan, profesional dan akuntabel, agar mampu melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.

Selain sebagai pelayan publik, seorang aparatur juga berfungsi sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat mendorong upaya mewujudkan pelayanan yang terbuka dan penuh tanggungjawab ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menuju pemerintahan yang kompetitif, pemerintahan yang berorientasi global, dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

**Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,**

Demikian sedikit pengantar yang dapat Saya sampaikan sebagai pembukaan Rapat Kerja Reformasi Birokrasi 2019. Saya berharap melalui rapat kerja ini kita semua dapat merumuskan dan menyepakati serta menggalang komitmen dukungan pelaksanaan agenda aksi percepatan reformasi birokrasi 2019 di DIY.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridho-Nya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, **Rapat Kerja Reformasi Birokrasi 2019**, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Ir. GATOT SAPTADI**



**Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan**

**“Kunjungan Kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pembahasan Perubahan BUMD”**

Yogyakarta, 23 Mei 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua

- Yang saya hormati, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur
- Yang saya hormati, Tim Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur
- Yang saya hormati, Tim Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur
- Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja terkait Pembahasan Perubahan BUMD ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Atas nama masyarakat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan “Sugeng Rawuh, Selamat

Datang” di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang hadir hari ini. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami akan berusaha membantu agar tujuan kunjungan kerja dapat tercapai secara maksimal.

***Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,***  
BUMD memiliki beberapa peran penting bagi Pemerintah Daerah, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha serta memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Tak kalah penting, adalah tujuan pendirian BUMD, yaitu memberikan sumbangsih pada perekonomian daerah, serta acap kali memberikan support dan proteksi terhadap usaha kecil dan menengah di suatu daerah. Menilik peran dan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha untuk selalu menyetatkan BUMD, salah satunya dengan upaya menjadikan BUMD sebagai profit center agar dapat menjadi sumber dana alternatif pembiayaan anggaran, *migunani lan nguwatake* ekonomi masyarakat. Perlu kami informasikan, saat ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa mengelola 4 (empat) BUMD, yaitu Bank BPD DIY, PD Tarumartani yang bergerak di industri cerutu, PD Purosani bergerak di industri logam, dan PD Anindya yang bergerak di bidang perdagangan.

***Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian,***  
Seperti kita ketahui bersama, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris serta Anggota Direksi BUMD, dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2018 mengatur mengenai masa jabatan, dan usia pensiun. Hal ini tentu memerlukan antisipasi dari Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penyeimbangan dan stabilitas dari BUMD, apalagi adanya kemungkinan bahwa kemungkinan BUMD hanya ada 2 bentuk, yakni Perusahaan Umum Daerah serta PT Persero Daerah.  
Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Berkaitan dengan materi

kunjungan kerja yang lebih mendalam, telah dipersiapkan data-data dan penjelasan secara rinci oleh instansi terkait. Selanjutnya, Saya persilahkan untuk dapat membahasnya pada diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY.

Sekian dan terima kasih,  
*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**SAMBUTAN**

**Kunjungan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi  
terkait Studi Banding Implementasi SAKIP**

Yogyakarta, 23 Mei 2019

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi
- Yang saya hormati, Kepala Bagian Organisasi
- Yang saya hormati, Sekretaris Inspektorat dan Sekretaris Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka Studi Banding Implementasi SAKIP ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya mengucapkan “**Sugeng Rawuh, Selamat Datang**” di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang hadir hari ini. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami akan berusaha membantu agar tujuan studi banding ini dapat tercapai secara maksimal.

**Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,**

Sebuah sejarah dan momen berharga bagi DIY tertoreh di kota Makasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019. Saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah DIY sebagai peraih pertama predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perlu kami sampaikan juga, di tingkat kabupaten dan kota, tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan predikat A, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman.

Perolehan predikat AA bagi DIY ini tentu sangat membanggakan, karena implementasi SAKIP menjadi indikator pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mempermudah pertanggungjawaban para abdi negara dalam hal kinerja. Implementasi SAKIP juga nyata-nyata mampu mengubah budaya kerja ASN, karena meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas negara. Belanja daerah juga telah secara nyata terkonversi ke arah belanja yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Berbagai kerja keras telah dilakukan, antara lain rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada money follow program dan proram follow result. 1.600 kegiatan berhasil dipangkas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tujuan meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja public dan investasi pada program-program yang mempunyai nilai strategis. Terkait layanan public, penguatan dilakukan pada inovasi dan pengukuran outcome yang berorientasi pada customer

perspective. Sekali lagi, outcome-lah yang menjadi indikator kinerja layanan public, tidak hanya output saja.

**Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,**

Bagi Pemerintah Daerah DIY, pelayanan public adalah prioritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan mindset menjadi pemerintah yang melayani akan mendorong masyarakat merasakan manfaat dari layanan public yang diberikan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat pada pemerintah dan daerah tempat mereka hidup, bekerja dan beraktivitas. Dalam mendukung upaya ini, Pemerintah Daerah DIY, dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam periode triwulan-an. Terbukti, banyak fenomena-fenomena dan peristiwa yang tertangkap, dan pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah acuan untuk memberikan layanan public yang terbaik bagi masyarakat DIY. Selain monitoring dan evaluasi, praktik baik yang telah dilaksanakan adalah pemberian *reward* dan *punishment*, memberikan rapor dan mempublikasikan capaian kinerja OPD di media massa. Hal ini bisa menjadi motivator, pemicu, sekaligus pemacu bagi OPD untuk bekerja dengan lebih baik dan terukur. SAKIP, dalam pandangan Kami, juga menjadi sebuah cara untuk memandang masa depan, memenuhi tanggung jawab sejarah, dan terpenting adalah demi memberikan layanan publik yang **baik dan nguwongke** bagi masyarakat DIY—menuju sebuah tatanan sosial yang *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Pemerintah Daerah DIY tentu tak akan berhenti melakukan inovasi dan optimalisasi layanan public setelah memperoleh predikat AA ini. Perubahan jaman, perkembangan di segala bidang akan secara otomatis menuntut peningkatan dan perbaikan layanan public. Kami percaya, bahwa prinsip moralitas **Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh** akan mampu menuntun ASN Pemerintah DIY untuk selalu bergerak dengan penuh konsentrasi,

bersemangat, dilandasi sebuah rasa kepercayaan diri tanpa mengabaikan sikap rendah hati dan bertanggung jawab. Penanaman sikap **SATRIYA** pada diri ASN, yang mencerminkan konsep **Selaras, Akal Budi Luhur-yang meyimbolkan jatidiri, Teladan-Keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin-dan percaya diri, dan Ahli-profesional** telah membawa kinerja ASN DIY ke kelas yang lebih tinggi. Kami percaya bahwa kualitas hard skill maupun soft skill ASN menjadi elemen terpenting dalam capaian terbaik layanan public saat ini.

**Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,**

Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Berkaitan dengan materi kunjungan kerja yang lebih mendalam, telah dipersiapkan data-data dan penjelasan secara rinci oleh instansi terkait. Selanjutnya, Saya persilahkan untuk dapat membahasnya pada diskusi dengan Bappeda DIY.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
MUSYAWARAH DAERAH I  
ALIANSI PENGEMBANG PERUMAHAN NASIONAL JAYA  
(APPERNAS JAYA) DIY  
Yogyakarta, 3 Mei 2019

-----  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya.*

Yang Kami hormati,

- Ketua dan Jajaran Dewan Pengurus Daerah Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) DIY;
- Para Peserta Musyawarah Daerah I Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) DIY;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Musyawarah Daerah I Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) DIY dalam keadaan sehat wal'afiat.

Peserta Musyawarah Daerah dan Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Indonesia telah menetapkan dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perseorangan ataupun dalam entitas sosial, baik dalam bentuk keluarga atau lainnya merupakan hak setiap orang atau warga negara.

Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap orang, untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan, dan atau hal lain untuk memenuhi martabatnya sebagai manusia.

Menghuni rumah yang layak berarti pengakuan status legal kependudukan yang membuka identitas sosial, akses pada program peningkatan kesejahteraan serta peluang usaha yang membutuhkan kredibilitas hunian. Kesepakatan universal telah mengelompokkan rumah sebagai bagian dari hak dasar bersama dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam konteks itulah, Pemerintah senantiasa mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dalam program percepatan capaian kinerja Program Sejuta Rumah. Pemerintah menaruh perhatian besar bahwa tersedianya perumahan rakyat yang berkualitas tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan kerjasama semua pihak.

Oleh karena itu, Saya berharap melalui Musyawarah Daerah I Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) DIY kali ini, APPERNAS JAYA DIY dapat tetap eksis dalam mengembangkan organisasinya yang dimungkinkan oleh regulasi saat ini, sehingga mampu mengatasi banyak permasalahan mengenai perumahan nasional serta dapat selalu mendukung dan terlibat dalam program pembangunan perumahan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Kemudian untuk jajaran pengurus dan anggota agar selalu berlandaskan peraturan organisasi APPERNAS JAYA DIY, baik dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan organisasi dengan mengedepankan prinsip integritas, profesional dan inovatif.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Musyawarah Daerah I Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) DIY, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
RAPAT KOORDINASI  
WILAYAH DIY UNTUK MENJAGA KETERSEDIAAN  
STOK/PASOKAN DAN STABILITAS HARGA BARANG  
KEBUTUHAN POKOK MENGHADAPI PUASA DAN  
LEBARAN 2019/1440 H  
Yogyakarta, 2 Mei 2019

---

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Pejabat dari Kementerian Perdagangan RI;
- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Yang saya hormati, Seluruh Anggota Tim TPID DIY;
- Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik Rapat Koordinasi Wilayah DIY untuk Menjaga Ketersediaan Stok/Pasokan dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Puasa dan Lebaran 2019/1440 H

kali ini. Dengan harapan acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar serta menghasilkan rumusan bersama guna menjaga ketersediaan stok/pasokan dan stabilitas harga barang.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Pada Rapat Koordinasi untuk Menjaga Ketersediaan Stok/Pasokan dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Puasa dan Lebaran 2019/1440 H di wilayah DIY kali ini. Maka perhatian yang harus kita fokuskan adalah terjadinya potensi *inflasi*, merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*kontinyu*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang dan jasa.

Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga [faktor produksi](#) meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Sedangkan inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau termasuk adanya kelangkaan distribusi. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, terjadinya bencana alam, cuaca ekstrim, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, adanya aksi spekulasi atau penimbunan, dan lainnya, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itu, saya sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan Rakor ini, sebagai upaya positif di dalam menjalin hubungan jaringan koordinasi dan komunikasi yang intens dan berkelanjutan antar *stakeholders* terkait di DIY.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
SIMPOSIUM PENTINGNYA PENCEGAHAN PENYAKIT  
MENULAR MELALUI MAKANAN UNTUK TENAGA  
PENJAMAH MAKANAN

Yogyakarta, 4 Mei 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati,

- Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Okupansi Indonesia;
- Perwakilan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
- Perwakilan dari PT. Sanofi Indonesia;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Simposium;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Simposium Pentingnya Pencegahan Penyakit Menular Melalui Makanan Untuk Tenaga Penjamah Makanan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyampaikan ucapan “Terima Kasih” dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT. Sanofi Indonesia atas terselenggaranya acara ini.

Peserta Simposium dan Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Pembangunan kesehatan yang berkualitas merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana masyarakat, bangsa dan negara dapat hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Usaha peningkatan derajat kesehatan diupayakan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), serta upaya-upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Usaha-usaha tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta peningkatan sistem pengamatan penyakit, pengkajian, cara penanggulangan secara terpadu dan menyelidiki terhadap penularan penyakit.

Dalam mewujudkan pelaksanaan upaya-upaya diatas tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan bidang kesehatan, baik masa kini maupun masa datang.

Salah satu program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Program tersebut dilaksanakan untuk mencegah berjangkitnya penyakit atau mengurangi angka kematian dan kesakitan, dan sedapat mungkin menghilangkan atau mengurangi akibat buruk dari penyakitmenular tersebut.

Untuk itulah, melalui Simposium Pentingnya Pencegahan Penyakit Menular Melalui Makanan Untuk Tenaga Penjamah Makanan yang diinisiasi oleh PT. Sanofi Indonesia ini tentunya dapat menjadi salah satu upaya program untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular khususnya yang melalui makanan seperti demam Tifoid dan Hepatitis A.

Harapannya melalui kegiatan ini para *stakeholder* terkait seperti penjamah makanan yang banyak bekerja di hotel dan restoran dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya pencegahan penyakit menular khususnya yang melalui makanan seperti demam Tifoid dan Hepatitis A.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Simposium Pentingnya Pencegahan Penyakit Menular Melalui Makanan Untuk Tenaga Penjamah Makanan, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI